Term Of Reference

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS MELALUI PENDIDIKAN PENGURANGAN RESIKO BENCANA BAGI PENYANDANG DISABILITAS

FGD dan Workshop Penyusunan Buku Panduan Dan Metode Pembelajaran Pendidikan Pengurangan Resiko Bencana Pada Penyandang Disabilitas Di Sekolah
Yogyakarta, 13 April 2017

Selama dekade terakhir, di Indonesia telah terjadi peningkatan bencana besar. Bencana-bencana besar tersebut antara lain bencana geologi, bencana perubahan iklim. Bahwa di Indonesia potensi bencana geologi, karena Indonesia berada pada *ring of fire* yang rawan terjadi gempa bumi, tsunami, banjir, letusan gunung merapi, tanah longsor. Bencana perubahan iklim rawan terjadi kekeringan, kemarau basah, angin puting beliung. Bencana-bencana ini bisa karena lingkungan, bisa juga karena buatan manusia. Dampak bencana tentunya memberikan pengaruh pada penduduk setempat. Dampak Bencana secara individual sangat tergantung pada berbagai faktor seperti kemiskinan, status sosial, lokasi geografis, akses ke mitigasi dan bantuan sumber daya.

Penyandang disabilitas yang jumlahnya diperkirakan sekitar 15% dari jumlah penduduk menghadapi risiko yang lebih tinggi ketika terjadi bencana. Data yang tersedia menunjukkan bahwa tingkat kematian penduduk disabilitas adalah dua sampai empat kali lebih tinggi dari populasi non-disabilitas dalam banyak situasi bencana (*United Nations Department Of Economic And Social Affairs*, 2014).

Penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang sering terabaikan ketika terjadi bencana. Oleh karena itu perlu adanya upaya untuk membantu mengurangi risiko bencana dan membangun masyarakat dan komunitas tangguh, dalam menghadapi bencana secara inklusi. Salah satu upaya mitigasi yang diperlukan adalah memberikan pendidikan kebencanaan. Pendidikan kebencanaan ini akan efektif dan efisien serta menjamin adanya keberlanjutan, apabila pendidikan kebencanaan ini dilakukan melalui sekolah. Pada saat ini pendidikan kebencanaan yang inklusif dan terstruktur di sekolah umum dan sekolah khusus belum dilaksanakan. Oleh karena itu pada program ini berupaya mengadvokasi adanya kebijakan menteri untuk dapat memastikan pemberian pendidikan kebencanaan yang inklusif sebagai kegiatan ekstrakuler pada sekolah umum dan sekolah luar biasa di Indonesia.

Maksud dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan perilaku tentang pengurangan resiko bencana yang inklusif. Dan kegiatan ini juga sesuai

dengan UU No 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas Pasal 109 tentang Perlindungan Bencana, bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengambil langkah yang diperlukan untuk menjamin penanganan penyandang disabilitas pada tahap prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.

Pilot project diakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Propinsi Kalimantan Selatan. Sasaran dari proyek ini adalah untuk mewujudkan pelayanan kebijakan pendidikan " pendidikan pengurangan risiko bencana " di sekolah inklusif dan sekolah khusus di Indonesia. Tujuan khusus dari program ini adalah:

1. Untuk mempelajari masalah dan kebutuhan penyandang disabilitas dalam situasi bencana
2. Untuk menyusun buku panduan dan metode pembelajaran "pendidikan pengurangan risiko bencana"
3. Untuk melakukan uji coba buku panduan dan metode pembelajaran sebagai implementasi pendidikan pengurangan risiko bencana sebagai kegiatan ekstrakurikuler di sekolah inklusif dan sekolah khusus
4. Untuk mendorong terwujudnya kebijakan pada pelaksanaan pendidikan "Risiko Bencana Pendidikan Pengurangan" di sekolah-sekolah inklusi dan sekolah khusus.

Perubahan yang diharapkan adalah adanya kebijakan tentang Pelaksanaan "Pendidikan Pengurangan Risiko Bencana" di Sekolah Inklusif dan Sekolah Luar Biasa di Indonesia. Kegiatan ini dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan pada pengurangan risiko bencana inklusif. Diharapkan bahwa para penyandang disabilitas dapat dilindungi saat terjadi bencana. Program ini dapat menghasilkan buku panduan dan metode pembelajaran "pendidikan pengurangan risiko bencana" yang inklusif, yang dapat diajarkan melalui sekolah baik di Sekolah Luar Biasa maupun sekolah inklusi.

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Forum Penguatan Hak Penyandang Disabilitas yang merupakan kerjasama dari : CIQAL (Center For Improving Qualified Activities In Live of People With Disabilities), ILAI (Independent Legal Aid Institute, Majelis Pemberdayaan Masyarakat PP Muhammadiyah dan didukung juga oleh Majelis Pemberdayaan Masyarakat PWM Kalimantan Selatan.

Dr. Arni Surwanti., M.Si

Koordinator Forum Penguatan Hak Penyandang Disabilitas